

**STRATEGI PENGAWASAN INTERNAL
KEMENRISTEKDIKTI DAN PROBLEMA PENGADAAN
BARANG DAN JASA PEMERINTAH**

Oleh :

**Prof. Dr. Jamal Wiwoho, SH, M.Hum.
Inspektur Jenderal Kemenristekdikti**

**DISAMPAIKAN DALAM KULIAH UMUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

13 NOPEMBER 2015

Curriculum Vitae



- Nama** : Prof Dr. H. JAMAL WIWOHO, S.H., M.Hum.
- Tempat tgl lahir** : Magelang, 8 November 1962
- Tempat tinggal** : Jl Manunggal 1/43 Solo, Jateng 0271-856848
- Pendidikan** : S1 FH UNS, S2 PPS UNDIP, S3 DOKTOR ILMU HUKUM UNDIP
- Status** : BERKELUARGA, 1 ISTRI , 3 ANAK
- HP** : 08122601681
- e-mail** : jamal@jamalwiwoho.com atau jamalwiwoho@yahoo.com
- Website** : www.jamalwiwoho.com
- Twitter** : @jamalwiwoho
- Facebook** : jamalwiwoho
- Pekerjaan** : - Inspektur Jenderal Kemenristek Dikti
- Pengalaman** : - Wakil Rektor II UNS Surakarta
- Ketua forum PR II / WR II Se – Indonesia
- Dosen S1/S2/S3 FH UNS Solo
- Lain-lain:
- Reviewer Nasional DP2M Dikti, Instruktur brevet, Konsultan DPRD Ngawi- Jatim, DPRD Karanganyar-Jateng, DPRD Surakarta, DPRD Balikpapan, Konsultan IAPI, Konsultan Pemda Ngawi, Pemda Magetan Jatim, Pemkot Gorontalo, saksi ahli di beberapa Pengadilan, dll.
 - Dosen Pascasarjana di MM FE UNS, STIH IBLAM Jakarta, Univ Djuanda Bogor, Univ Swadaya Gunung Jati Cirebon, Univ Batik Solo, MM STIE AUB Surakarta, Unibraw Malang (disertasi) dll.



INSTITUSI PENGAWASAN INTERN

SPI

Satuan Pengawasan yang dibentuk untuk terlaksananya pengawasan terhadap satuan tugas unit kerja

BPKP

• Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP adalah aparat pengawasan Intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden

Inspektorat Jenderal

• Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern adalah aparat pengawas intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Menteri/pimpinan lembaga.

Inspektorat Propinsi

• Inspektorat propinsi adalah aparat pengawas intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Gubernur

Inspektorat Kabupaten/Kota

• Inspektorat Kabupaten /Kota adalah aparat pengawas intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada bupati/walikota

PERGESERAN FUNGSI PENGAWASAN INTERNAL

Lingkup	Paradigma Lama	Paradigma Baru
Fungsi	Watchdog Mengungkap temuan Menggangu obyek Reaktif	Watchdog, Konsultan & Katalisator Memecahkan Masalah Membantu Klien Proaktif
Sifat/Rekomendasi	Post Audit Korektif	Post & Prea Audit Korektif, Preventif, Prediktif
Pendekatan	Subyek-Obyek <i>Win-Lose</i>	Subyek-Subyek (<i>Partnership</i>) <i>Win-win</i>
Organisasi	Memenuhi Ketentuan	Alat/Tools Manajemen Pusat Unggulan
Indikator Kinerja	Jumlah Temuan	Jumlah Bantuan/Manfaat Pencapaian <i>Good Governance</i>



PENGENDALIAN INTERN

PP NOMOR 60 TAHUN 2008



Menristekdikti wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada SPIP

SPIP memberikan keyakinan yang memadai bagi:

1. Tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara,
2. Keandalan laporan keuangan,
3. Pengamanan aset negara, dan
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan



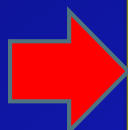
DILAKUKAN PENGAWASAN INTERN OLEH APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP)



KEMRISTEKDIKTI:

Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara

PERPRES NO. 13 TAHUN 2015



Mengendalikan

UUD 45: sebagian fungsi pendidikan dengan +/- 20% dari APBN dan mencerdaskan kehidupan bangsa

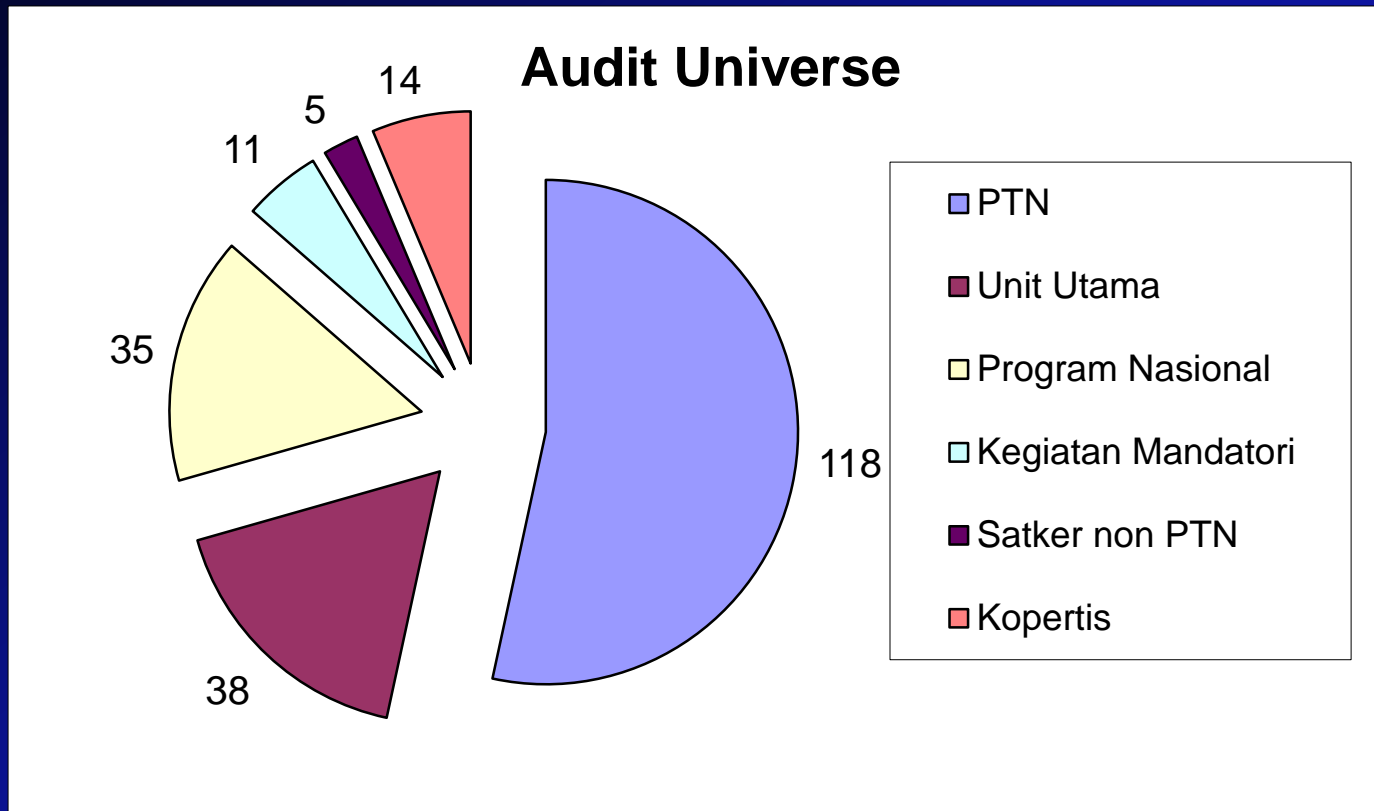
150 satker

120.000 orang pegawai

Rp41,507 T APBNP

Rp92,478 T Aset

Penerimaan dan penggabungan P3D Ristek dengan Dikti



- Dari data lingkup audit tersebut, disusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan menggunakan pendekatan Audit Berbasis Risiko
- Hibah dan PHLN termasuk dalam data Program Nasional yang menjadi salah satu lingkup pengawasan Itjen Kemristekdikti

Belanja Negara APBNP 2015

Rp. 1.994,89 T



Anggaran Pendidikan (20.39%)

Rp.406,70 T

(37,5%)

(Rp. Milyar)

Belanja Pemerintah Pusat	152.451,7
1. Kementerian Ristek dan Dikti	41.507,7
2. Kementerian Dikbud	53.278,5
3. Kementerian Agama	48.662,0
4. K/L lainnya	9.003,4

(62,5%)

(Rp. Milyar)

Belanja Transfer Daerah	254.252,3
1. Anggaran Pendidikan dalam DBH	1,337.7
2. DAK Pendidikan	10,041.3
3. Anggaran Pendidikan dalam DAU	134,970.3
4. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1,096.0
5. Tunjangan Profesi Guru	70,252.7
6. Anggaran Pendidikan dalam OTSUS	4,234.7
7. Dana Insentif Daerah	1,664.5
8. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	31,298.3

PAGU ANGGARAN TAHUN 2016

➤ **Penerimaan**

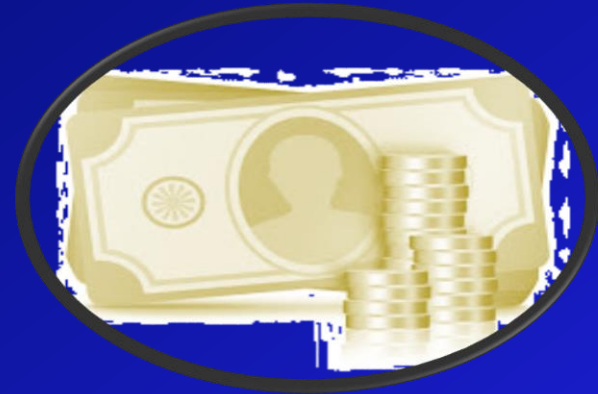
Rp. 1. 898 T

➤ **Belanja**

Rp. 2. 121 T

➤ **Defisit**

Rp. 273,2 T



KEMRISTEKDIKTI 2016
RP. 40.627 T

- Untuk Pelayanan Umum

Rp. 965 M

- Untuk Pendidikan

Rp.39.662 T

STRATEGI PENGAWASAN ITJEN KEMRISTEKDIKTI

1. Membangun komitmen seluruh jajaran Kemristekdikti, mulai dari pimpinan sampai staf terbawah.
2. Membangun sinergitas dengan pihak-pihak terkait (BPKP, Auditi, dan pihak eksternal lainnya)
3. Mengoptimalkan Kapasitas Inspektorat Jenderal:
 - a. Mengoptimalkan peran dan layanan Inspektorat Jenderal audit kinerja, pemberian peringatan dini, dan konsultasi.
 - b. Mengoptimalkan manajemen sumber daya manusia Inspektorat Jenderal dengan kuantitas dan kualitas yang memadai.
 - c. Menerapkan praktik-praktik pemeriksaan intern yang profesional.
 - d. Meningkatkan akuntabilitas dan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal secara baik.
 - e. Membangun hubungan dan budaya organisasi yang baik dengan pihak-pihak lain yang terkait.
 - f. Menerapkan struktur tata kelola yang baik.
4. Mengoptimalkan Kapasitas dan Peran Satuan Pengawas Intern (SPI) PTN:
 - a. Meningkatkan peran dan fungsi SPI sebagai pengawal PTN
 - b. Mengupayakan penegasan struktur organisasi SPI PTN
 - c. Meningkatkan kapabilitas SDM SPI PTN

KEBIJAKAN PELAKSANAAN TUGAS ITJEN KEMRISTEKDIKTI

TUGAS ITJEN:

Menyelenggarakan pengawasan
intern di lingkungan Kemristek
dan Dikti

PERPRES NO. 13 TAHUN 2015



KEGIATAN

1. AUDIT
2. REVIU
3. EVALUASI
4. PEMANTAUAN
5. PENGAWASAN LAINNYA



PERAN DAN POSISI ITJEN

1. PEMBERI PERINGATAN DINI
2. KATALISATOR
3. KONSULTAN

PENGAWALAN

TUGAS DAN FUNGSI KEMENRISTEK DAN DIKTI

Mencegah dan melindungi
sesuatu

Dari ketidaknyamanan dan
kehancuran



Mencegah



Mengarahkan



Menghentikan



Mendorong

BARANG MILIK NEGARA

Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau perolehan lainnya yang sah.

“Yang dimaksud perolehan yang sah adalah barang yang diperoleh dari hibah /sumbangan, pelaksanaan dari perjanjian / kontrak, berdasarkan ketentuan undang – undang dan atau hasil dari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA



Permasalahan Yang Mungkin Terjadi

- ⦿ **Pengelolaan Aset belum mengikuti PP No. 27 Tahun 2014**
- ⦿ **Adanya aset yang belum tercatat/dibukukan**
- ⦿ **Tidak diketahui keberadaan Aset**
- ⦿ **Kategori kondisi aset tidak sesuai dengan laporan**
- ⦿ **Aset yang tercatat tidak ada dasar pencatatannya**
- ⦿ **Pendistribusian / mutasi barang tidak dilengkapi dengan administrasi yang cukup**
- ⦿ **Inventarisasi/sensus terhadap BMN tidak pernah dilakukan**
- ⦿ **Pengamanan aset yang kurang memadai**

Permasalahan Yang Mungkin Terjadi

1

- TANAH/Bangunan tidak didukung dengan Bukti Pemilikan (bersertifikat/IMB a/n Satker)

2

- Masih terdapat BMN yang tidak ada nilainya

3

- BAST selama tahun 2015 tidak mencantumkan nilai

4

- BMN yang Rusak Berat/tdk mendukung tupoksi belum di proses penghapusannya

1. Berubah-ubahnya aturan PBJ → Sulit dipahami
2. Terbatasnya SDM Pengadaan
3. Manajemen Universitas
4. Proses tender yang tidak transparan
5. Belum semua kampus ada ULP – LPSE
6. Suap Memenangkan tender
7. Gratifikasi untuk memenangkan tender
8. Supplier mematok harga tinggi

9. Adanya kelompok-kelompok tertentu yang mempengaruhi dalam pembuatan dan persyaratan tender
10. Terbatasnya waktu pengadaan
11. Adanya almamater centris
12. Birokrasi yang berbelit-belit
13. Peraturan lelang dibuat mengambang / tidak jelas
14. Adanya konspirasi dengan pihak ke III (Pemda, DPRD dan peserta Lelang lainnya)
15. Penandatanganan Pakta Integritas yang belum sesuai dengan harapan

PERAN ITJEN KEMRISTEKDIKTI

Jangan Sampai Seperti ini !!!



Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral



Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga



Mantan Menteri Agama

TERIMA KASIH.....